

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dalam penggerak pertumbuhan ekonomi. Karakteristik dari dinamika dan kinerja ekonomi yang baik dengan laju pertumbuhan yang tinggi di negara-negara Asia Timur dan Tenggara yang dikenal dengan *Newly Industrializing Countries* (NIC) seperti Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan adalah kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) mereka yang sangat efisien, produktif dan memiliki tingkat daya saing yang tinggi. UKM di negara-negara tersebut sangat responsif terhadap kebijakan pemerintahannya dalam pembangunan sektor swasta dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekspor. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 3 disebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan<sup>1</sup>.

Pada krisis ekonomi tahun 1997 yang terjadi di Indonesia banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi hingga berhenti aktivitas, fleksibilitas dan ketangguhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

krisis ekonomi bahkan menjadi katup penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa karena kemampuannya dalam memberikan sumbangan yang cukup signifikan pada Produk Domestik Bruto (PDB) maupun penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan survey dan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM telah mencetak kontribusi pada PDB hingga 6,5% pada tahun 2008 dan akhirnya meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% dalam 5 tahun terakhir. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak hanya menjadi penopang perekonomian di Indonesia, tetapi juga ASEAN. Data menunjukkan bahwa sekitar 88.8% sampai 99.9% bentuk usaha Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) adalah UMKM dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51.7% sampai 97.2%. Perkembangan UMKM yang pesat tidak terlepas dari peran pemilik usaha yang mampu bertahan dan bersaing dalam perekonomian global<sup>2</sup>.

Langkah Pemerintah guna meningkatkan perekonomian Indonesia terutama di daerah yaitu dengan memberlakukan otonomi daerah, dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menetapkan berbagai kebijakan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan otonomi daerah tersebut setiap daerah di Indonesia diharuskan untuk dapat mengembangkan setiap potensi lokal yang dimilikinya agar dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan regional maupun global.<sup>3</sup> Pembangunan ekonomi suatu wilayah lebih mengarah pada pendekatan yang berorientasi pada

---

<sup>2</sup> S. Mevia, Strategi Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), 2021.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

pengembangan sumber daya lokal yang merupakan faktor-faktor endogen wilayah tersebut secara optimal dan maksimal. Penekanan pada pengembangan potensi lokal inilah yang membawa pembahasan menuju ke konsep pengembangan ekonomi lokal. Adapun Pengembangan Ekonomi Lokal sendiri pada prinsipnya merupakan suatu proses ketika aktor-aktor di dalam komunitas baik kota, wilayah regional maupun kota-kota besar yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat bekerjasama secara kolektif untuk menciptakan kondisi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan generasi yang lebih baik. Berdasarkan hal tersebut diperlukan sinergitas antara pelaku UMKM dan Pemerintah yang berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM sehingga mampu meningkatkan kemampuan pelaku UMKM<sup>4</sup>.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar digerakkan oleh pertumbuhan industri manufaktur yang pesat. Dan di antara beberapa kelompok dalam sektor industri manufaktur, pembangunan, dan pertumbuhan sektor Usaha Kecil dan Menengah merupakan salah satu motor penggerak yang penting bagi perkembangan ekonomi wilayah di Indonesia. Peran besar UKM dalam pengembangan ekonomi suatu wilayah tersebut terutama karena sektor UMKM menyerap cukup banyak sumber daya yang apabila dieksploitasi secara proporsional akan dapat memberikan *multiplier effect* yang mendorong pengembangan wilayah yang signifikan. Hal tersebut berasal dari jumlah unit

---

<sup>4</sup> Siagian, Sondang, Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan strateginya, 2012, 145.

usahanya yang sangat banyak di sektor ekonomi serta kontribusinya yang besar terhadap penciptaan kesempatan kerja dan sumber pendapatan<sup>5</sup>.

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM, tujuan utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk yang semakin membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja di Indonesia. Pada hakikatnya, pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi terkadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali untuk kemudian dikembangkan, dengan cara mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Disamping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Ghalib Agfa Polnaya, Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal Untuk Meningkatkan Daya Saing Pada UKM Ekonomi Kreatif Batik Bakaran Di Pati, Jawa Tengah, 2015.

<sup>6</sup> Y. Soedjito, Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan UMKM, 2018.

**Tabel 1.1**  
**Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dan**  
**Usaha Besar Tahun 2019**

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2019	
			Jumlah	Pangsa (%)
1	UNIT USAHA (A+B)	(Unit)	65.471.134	
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Unit)	65.465.497	99,99
	- Usaha Mikro (UMi)	(Unit)	64.601.352	98,67
	- Usaha Kecil (UK)	(Unit)	798.679	1,22
	- Usaha Menengah (UM)	(Unit)	65.465	0,10
	B. Usaha Besar (UB)	(Unit)	5.637	0,01
2.	TENAGA KERJA (A+B)	(Orang)	123.368.672	
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Orang)	119.562.843	96,92
	- Usaha Mikro (UMi)	(Orang)	109.842.384	89,04
	- Usaha Kecil (UK)	(Orang)	5.930.317	4,81
	- Usaha Menengah (UM)	(Orang)	3.790.142	3,07
	B. Usaha Besar (UB)	(Orang)	3.805.829	3,08
3.	PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B)	(Rp. Miliar)	15.832.535,4	
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Miliar)	9.580.762,7	60,51
	- Usaha Mikro (UMi)	(Rp. Miliar)	5.913.246,7	37,35
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Miliar)	1.508.970,1	9,53
	- Usaha Menengah (UM)	(Rp. Miliar)	2.158.545,8	13,63
	B. Usaha Besar (UB)	(Rp. Miliar)	6.251.772,7	39,49
	PDB ATAS HARGA	(Rp. Miliar)	12.309.904,	

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2019	
			Jumlah	Pangsa (%)
	KONSTAN 2000 (A+B)		8	
4.	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Miliar)	7.034.146,7	57,14
	- Usaha Mikro (UMi)	(Rp. Miliar)	3.701.368,0	30,07
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Miliar)	1.536.961,1	12,49
	- Usaha Menengah (UM)	(Rp. Miliar)	1.795.817,7	14,59
	B. Usaha Besar (UB)	(Rp. Miliar)	5.275.758,1	42,86

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM

Berdasarkan tabel 1.1 memperlihatkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2019 total nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp 15,832,535.4 seperti yang terlihat pada tabel 1.1. UMKM memberikan kontribusi sebesar Rp 9,580,762.7 atau 60,51% dari total PDB Indonesia. Jumlah populasi UMKM Indonesia pada tahun 2019 mencapai 65,46 juta unit usaha atau 99,99% terhadap total unit usaha di Indonesia, sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 119,56 juta orang atau 96,92% terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat penting dan menguntungkan bagi peningkatan Produk Domestik Bruto Indonesia untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

Keterbatasan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang paling sering terungkap adalah keterbatasan modal fisik (finansial, struktur, dan infrastruktur) dan kesulitan dalam pemasaran<sup>7</sup>, kesulitan dalam pemasaran dapat dilihat sebagai salah satu akibat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan

<sup>7</sup> Tambunan, Tulus, Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, 2002

pengusaha serta keterbatasan teknologi yang membuat produk-produk UMKM belum memiliki kualitas dan harga yang kompetitif. Keterbatasan faktor-faktor tersebut merupakan salah satu penyebab utama rendahnya daya saing produk UMKM dari produk-produk usaha besar atau produk-produk impor<sup>8</sup>.

Upaya pengembangan UMKM dari pihak pemerintah banyak dilakukan melalui bantuan kebijakan studi, permodalan, pelatihan maupun bantuan jalur pemasaran yang hanya bersifat “*stagnan*” dalam arti tidak berkelanjutan. Sebagai akibatnya, upaya-upaya tersebut banyak mengalami kegagalan secara sepihak karena kurangnya strategi pengembangan eksternal. Kesulitan memperluas pangsa pasar baru dan ancaman produk-produk luar sejenis menjadi masalah eksternal bagi pengusaha produk lokal<sup>9</sup>.

Konsep ekonomi kreatif ternyata mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian di beberapa negara. Di Indonesia, ekonomi kreatif dimulai dari permasalahan akan pentingnya meningkatkan daya saing produk nasional untuk menghadapi pasar global<sup>10</sup>. Perkembangan ekonomi di suatu wilayah dapat dilihat dari sektor-sektor yang menjadi unggul di wilayahnya. Sektor ekonomi unggulan yang ada perlu digali dan dikembangkan semaksimal mungkin agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam menunjang terjadinya pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan sektor

---

<sup>8</sup> Abdul Halim, Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju, 2020.

<sup>9</sup> Polnaya, Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal Untuk Meningkatkan Daya Saing Pada UKM Ekonomi Kreatif Batik Bakaran Di Pati, Jawa Tengah, 2015.

<sup>10</sup> Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2008.

unggulan dapat diketahui dengan melihat data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)<sup>11</sup>.

**Tabel 1.2**  
**Data Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 2013-2015 (Juta Rupiah)**

No.	Lapangan Usaha	Tahun		
		2013	2014	2015
	<b>Primer</b>	<b>603.329,30</b>	<b>617.400,70</b>	<b>619.573,90</b>
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	602.103,20	616.148,00	618,90
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.226,10	1.252,70	1.278,00
	<b>Sekunder</b>	<b>3.145.566,70</b>	<b>3.362.734,00</b>	<b>3.585.246,00</b>
1.	Industri pengolahan	1.638.282,80	1.691.003,90	1.748.700,50
2.	Pengadaan Listrik dan Gas	1.191,20	12.518	1.263,50
3.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	41.900,40	43.144,90	44.807,70
4.	Konstruksi	1.464.192,4	1.627.333,40	1.790.474,50
	<b>Tersier</b>	<b>7.212.974,50</b>	<b>7.657.148,00</b>	<b>8.164.971,80</b>
1.	Perdagangan Besar dan Eceran	2.652.346,70	2.862.497,70	3.060.148,60
2.	Transportasi dan Pergudangan	1.090.996,90	1.111.908,10	1.172.819,30
3.	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	517.699,50	544.446,30	576.393,10
4.	Informasi dan	334.532,50	389.072,80	440.613,20

<sup>11</sup> T. Setiyawan, *Creative Industry Development Strategy To Improve The Competitive Of Local Economic Players*, 2020.

No.	Lapangan Usaha	Tahun		
		2013	2014	2015
	Komunikasi			
5.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.140.110,10	1.196.121,50	1.272.815,20
6.	Real Estate	187.054,90	193.919,80	200.869,80
7.	Jasa Perusahaan	123.847,60	127.161,70	130.475,90
8.	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	496.347,50	508.023,50	520.504,90
9.	Jasa Pendidikan	179.853,70	199.661,60	220.817,80
10.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	201.352,80	218.481,40	245.610,00
11.	Jasa Lainnya	288.832,40	305.853,50	323.903,90
	<b>PDRB</b>	10.961.870,60	11.637.282,70	12.369.791,70

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya

Berdasarkan tabel 1.2 memperlihatkan data nilai produk domestik regional bruto Kota Tasikmalaya atas dasar harga konstan selama periode 2013-2015 menunjukkan beberapa sektor yang masih tidak maksimal jika dilihat dari perkembangannya seperti, sektor perdagangan, keuangan dan jasa sehingga perlu adanya perbaikan dari pemerintah dalam pengembangannya. Nilai pergeseran dengan perkiraan yang ada akan membuat pemerintah Kota Tasikmalaya menghasilkan kebijakan dalam mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Sehingga, pemerintah daerah mampu memprioritaskan perencanaan pembangunan terhadap seluruh sektor yang menjadi unggulan maupun yang belum mampu memberi kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Tasikmalaya. Sektor-sektor yang sudah menjadi unggul diharapkan mampu dalam mengangkat sektor

lainya agar lebih maju, serta nilai proyeksi yang ada membuat pemerintah daerah dapat mengembangkan sektor-sektor yang menjadi unggulan di masa mendatang guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Tasikmalaya dan menjadikan pertumbuhan ekonomi yang berjalan secara bersamaan walaupun tingkat perkembangan yang berbeda-beda.

Kota Tasikmalaya memiliki beragam potensi industri yang diantaranya dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:

**Tabel 1.3**  
**Data Potensi Industri Kota Tasikmalaya tahun 2009-2022**

No.	Komoditi	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Investasi
1.	Bordir	1.440	14.397	248.973.442
2.	Anyaman Mendong	174	2.292	7.131.232
3.	Anyaman Bambu	99	836	6.105.038
4.	Alas Kaki (Kelom Geulis, Sandal dan Sepatu)	572	6.600	55.051.094
5.	Kayu Olahan (Mebel)	229	1.602	28.659.699
6.	Batik	46	734	7.942.576
7.	Payung Geulis	8	56	45.500
8.	Makanan Olahan	1.689	9.096	99.255.955
	Jumlah	4.256	35.604	453.164.537

*Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya*

Berdasarkan tabel 1.3 memperlihatkan jumlah potensi industri di Kota Tasikmalaya dengan jumlah 4.256 unit usaha, jumlah 35.604 tenaga kerja dan jumlah 453.164.537 nilai investasi, industri payung geulis berada pada posisi nilai investasi paling rendah. Hal ini mengakibatkan industri payung geulis belum mampu memberikan sumbangan besar dengan permasalahan tersebut,

pengembangan UMKM industri payung geulis perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah, pengusaha maupun masyarakat itu sendiri agar dapat mengembangkan daya saing yang menghasilkan daya jual yang tinggi. Kebijakan pemerintah dirasa perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UMKM, disamping itu juga mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pelaku UMKM, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengembangan usaha mikro, kontribusi UMKM dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang bertujuan untuk mewujudkan produk lokal unggulan yang inovatif, dengan dukungan pemerintah daerah dalam pemasaran hasil produk payung geulis agar memiliki daya jual yang tinggi. Hal ini bertujuan untuk kesejahteraan pengrajin payung geulis, pengusaha, dan masyarakat.

Penelitian yang memiliki fokus yang sama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Shabilla 2023 dengan judul Analisis Pengembangan UMKM Mainan Kayu Di Daerah Jurangombo Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah. Maftuhah 2017 dengan Judul Dampak Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, dan Ristanti 2014 dengan judul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Sentra Kerajinan Tatah Sungging Wayang Kulit Di Dusun Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa UMKM adalah representasi rakyat

Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional, maka perlu diberikan prioritas yang tinggi dalam pembangunan ekonomi. Sehingga diperlukan adanya pengembangan UMKM di Indonesia yang terintegrasi, sistematis, dan strategis yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan dalam memberdayakan potensi UMKM yang lebih berorientasi. Pihak Pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengembangan UMKM, khususnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagai organisasi yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola bidang tersebut.

Dari pernyataan diatas dan juga penelitian terdahulu terkait dengan tema kebijakan publik yang berkaitan dengan ekonomi politik, maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pengembangan industri payung geulis yang diharapkan menjadi produk lokal unggulan yang inovatif dan berdaya saing tinggi, karena dasarnya Payung Geulis ini merupakan sebuah produk budaya akan tetapi memiliki keterikatan dengan politik dan ekonomi. Proses pengembangannya juga perlu dilakukan aspek budaya, politik, dan ekonomi untuk terus mempertahankan eksistensi Payung Geulis. Berdasarkan latar belakang inilah peneliti tertarik untuk menganalisis pengembangan industri payung geulis oleh karena itu, penulis mengambil judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Pengembangan Industri Payung Geulis di Kota Tasikmalaya)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 terhadap pengembangan industri Payung Geulis di Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana pengembangan industri Payung Geulis dalam analisis ekonomi politik?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengembangan Usaha Mikro terhadap industri Payung Geulis di Kota Tasikmalaya.
2. Mengetahui bagaimana pengembangan industri Payung Geulis dalam analisis ekonomi politik.

## **1.4 Manfaat penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya pengetahuan ilmu sosial dan ilmu politik khususnya dalam kajian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Pengembangan Industri Payung Geulis di Kota Tasikmalaya). Serta dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan informasi, masukan, pertimbangan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Pengembangan Industri Payung Geulis di Kota Tasikmalaya).
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan pemahaman Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Pengembangan Industri Payung Geulis di Kota Tasikmalaya).
3. Bagi masyarakat, penelitian ini dibuat dengan tujuan memberikan gambaran yang ilmiah dan realistis sebagai suatu sarana untuk menambah informasi serta wawasan tentang pengembangan industri payung geulis di Kota Tasikmalaya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam upaya mengembangkan payung geulis di Kota Tasikmalaya.